

Integrasi Nasional Indonesia: Beberapa Catatan

Harsja W. BACHTIAR*

DUA PANDANGAN YANG BERBEDA

Ada paling sedikit 2 pandangan yang berbeda tentang integrasi bangsa Indonesia sekarang ini dan tentu saja masing-masing pandangan ini mengakibatkan juga kebijaksanaan yang berbeda berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan integrasi bangsa.

Pandangan pertama didasarkan atas anggapan bahwa bangsa Indonesia telah ada sejak amat lama, mungkin sudah sejak zaman prasejarah. Dalam masa tertentu terutama dalam masa kerajaan agung Sriwijaya dan Majapahit, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tampak jelas terwujud sebagai satu kesatuan politik yang besar. Akan tetapi kemudian dengan menggunakan cara memecah-belah persatuan besar ini (devide et impera) para penjajah asing berhasil menguasai bangsa Indonesia dan memanfaatkan kepulauan yang menjadi tanah jajahannya dengan penduduk taklukannya untuk meningkatkan kemakmuran di tanah asal mereka di Eropa. Sekarang bangsa Indonesia telah berhasil dibebaskan dari kekuasaan penjajah dan dijadikan negara merdeka kembali, Republik Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia tumbuh berkembang menjadi negara yang cukup terkemuka, cukup terhormat di dunia kita ini, penjajahan asing di masa lampau dan berbagai perbedaan politik, dan sebagian disebabkan oleh pengaruh kekuatan-kekuatan asing, mengakibatkan masih adanya berbagai perpecahan politik, pertentangan politik, yang harus dihentikan agar kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dapat dipulihkan kembali.

Pandangan kedua, yang dianut oleh pemrakarsa didasarkan atas anggapan bahwa sebelum permulaan abad XX ini, tidak pernah ada penduduk di ke-

*Kepala BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

pulauan ini yang dapat dinamakan bangsa Indonesia. Malah nama "Indonesia" adalah ciptaan seorang ahli antropologi Inggris bernama J.R. Logan, yang memerlukan suatu nama untuk kepulauan yang terbentang antara Benua Asia dan Australia serta penduduknya yang pada waktu ia menulis karya ilmiah yang menggambarkan penduduk di kepulauan ini tahun 1850, tidak mempunyai nama sendiri. Pada permulaan abad XX ini nama Indonesia belum dikenal oleh penduduk kepulauan kita sendiri. Pada waktu itu hanyalah ada bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Sunda, bangsa Bali, bangsa Bugis dan demikian seterusnya. Gerakan kebangsaan Indonesia mempersatukan bangsa-bangsa di kepulauan kita menjadi satu nation yang besar, satu nation yang agung, bangsa Indonesia. Proses mempersatukan satuan-satuan penduduk yang sebelum ini terpisah-pisah masih berlangsung, sehingga proses inilah yang dimaksud bilamana "integrasi nasional dibicarakan." Pertumbuhan nation Indonesia menjadi nation yang besar, agung dan jaya, adalah suatu keberhasilan yang bisa dibanggakan. Akan tetapi masih banyak orang yang menurut hukum berkewarganegaraan Indonesia, seperti suku-suku bangsa yang masih terasing di pedalaman Irian Barat, dalam kenyataan belum sungguh-sungguh merupakan bagian dari nation Indonesia. Lagipula hubungan antar-golongan yang masih baru masih harus diperkuat agar supaya tidak mudah retak, ataupun malah putus. Pertentangan politik belum tentu mengakibatkan nation Indonesia menjadi lemah. Pertentangan politik bisa mengakibatkan persatuan nation Indonesia menjadi kuat bilamana pertentangan politik yang bersangkutan mempersatukan orang-orang dari berbagai golongan yang jelas berbeda, seperti orang-orang yang berbeda ras, suku bangsa dan agama, dalam menghadapi pihak lain yang juga mempersatukan orang-orang dari golongan-golongan yang berbeda ini.

Kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu; orang-orang yang bekerja dalam bidang ilmu-ilmu sosial tentu cenderung menggunakan suatu sistem teori tertentu yang terdiri dari asumsi-asumsi, konsesi-konsesi serta proposisi-proposisi tertentu yang semestinya berhubungan satu dengan yang lain menurut cara berpikir yang teratur maupun yang merujuk pada kenyataan empirik, kenyataan yang dapat diamati dan digambarkan.

Masalah yang sekarang kita hadapi, masalah integrasi nasional, diwujudkan oleh seperangkat gejala sosial tertentu dalam dunia nyata yang bisa ditanggapi, digambarkan dan dianalisa dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran tertentu, suatu sistem teori tertentu.

Konsep dasar dalam menghadapi masalah integrasi bangsa Indonesia adalah konsep "bangsa" atau "nation," dua konsep yang tidak sepenuhnya merujuk pada gejala yang sama. Konsep "bangsa" menurut hemat pemrakarsa, didasarkan atas anggapan bahwa orang-orang yang merupakan kolektiva

sosial yang bersangkutan sudah turun-temurun merupakan satu kolektiva sosial, bahkan mungkin sekali semua mempunyai nenek moyang yang sama, suatu ide yang biasanya diperkuat oleh suatu mitos yang menjelaskan asal mula bangsa yang bersangkutan, biasanya dengan menampilkan seseorang atau sepasang manusia istimewa sebagai asal mula bangsa. Pengertian demikian, yang cenderung menyamakan "bangsa" dengan semacam ras, mempersulit penerimaan orang yang tidak mempunyai nenek moyang yang sama sebagai anggota penuh bangsa yang bersangkutan, terlebih lagi bilamana jelas-jelas nenek moyang mereka adalah bagian dari bangsa lain.

Konsep "nation," sebagaimana dijelaskan oleh Ernest Renan dalam kuliah umumnya di Universitas Sorbonne, Paris, tahun 1882, tidak mengandung kesulitan yang terdapat pada konsep "bangsa," karena nation biasanya malah terjadi dari percampuran, pemersatuan dari berbagai penduduk. Suatu nation tidak didasarkan atas ras tertentu, bahasa tertentu, agama tertentu, kesamaan kepentingan, ataupun batas-batas alamiah yang dapat dilihat pada peta. "Suatu nation ialah suatu solidaritas yang besar," kata Renan, "tercipta oleh perasaan-perasaan yang disebabkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang cenderung akan dibuat lagi di masa depan. Suatu nation mempunyai masa lampau akan tetapi meneruskan dirinya dalam masa kini dengan suatu fakta yang tegas: kesepakatan, kehendak yang dinyatakan dengan jelas untuk meneruskan hidup bersama." Kehendak untuk hidup bersama dapat dilakukan dengan siapa saja, termasuk orang-orang yang rasnya berbeda suku bangsanya berbeda, ataupun agamanya berbeda.

Konsep "nation," oleh sebab itu, mungkin merupakan konsep yang lebih tepat merujuk pada bagian-bagian penduduk di kepulauan Indonesia yang dimaksud bilamana kita berbicara tentang "integrasi" nasional dari pada konsep "bangsa."

BEBERAPA FAKTA SEJARAH

Pada permulaan abad XX mulai terbentuk pengelompokan-pengelompokan sosial, ekonomi dan politik baru di masyarakat jajahan Hindia-Belanda; kolektiva-kolektiva sosial baru yang tidak lagi didasarkan atas hubungan kekerabatan atau kebudayaan tradisional (adat).

1. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang pendidikan modern: berbagai jenis sekolah dasar dan kemudian menengah; sejak 1920 juga beberapa perguruan tinggi. Sistem pendidikan tidak satu: pribumi (agama; umum), Belanda, Cina dan Arab.
2. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam lapangan kerja: perusahaan dagang, persuratkabaran, dan sebagainya.

3. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang sosial dan politik atas dasar solidaritas kedaerahan: Boedi Oetomo, 1908; Ambonsch Studiebonds, 1909; Ambon's Bond, 1909; Mena Moeria, 1913; Pagoejoeban Pasoendan, 1914; Sarekat Soematra, 1918; Sarekat Ambon, 1920; Kaoem Betawi, 1923; Sarekat Madoera, 1925; dan sebagainya.
4. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang agama: Sarekat Islam, 1912; Moehammadijah, 1912; Centraal Sarekat Islam, 1915; Partai Sarekat Islam, 1923; Pakempalan Politiek Katolik Djawi, 1925; Nahdlatoel Oelama, 1926; Persatoean Tarbijah Islamijah, 1930; dan sebagainya.
5. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang kepemudaan:
 - a. Atas solidaritas kedaerahan: Tri Koro Darmo, 1915; Jong Java, 1918; Sekar Roekoen; Jong Soematanen Bond, 1918; Studeerenden Vereeniging Minahassa, 1918; Ambonsche Studeerenden (Jong Ambon), 1923; Jong Batak's Bond, 1925; dan sebagainya.
 - b. Atas dasar kebangsaan Indonesia: Perhimpoean Peladjar-peladjar Indonesia, 1926; Jong Indonesia (Pemoeda Indonesia), 1927; Indonesia Moeda, 1931; dan sebagainya.
 - c. Atas dasar agama: Jong Islamieten Bond, 1925; Moeda Katolik, 1929; Ansor Nahdlatoel Oelama, 1932; dan sebagainya.
6. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang kemahasiswaan: Bataviaasche Studenten Corps, 1924; Indonesische Studentenvereening Bandung; Unitas Studiosorum Indonesiensis, 1933; dan sebagainya.
7. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial atas dasar solidaritas rasial:
 - a. Tiong Hua Hwee Koan, 1900; Kuo Min Tang; Sin Po; Cung Hua Hui; Partai Tionghwa Indonesia, 1932; dan sebagainya.
 - b. Persatoean Arab Indonesia, 1936; Indo-Arabische Beweging, 1939; dan sebagainya.
 - c. Insulinde; Indische Partij 1912; National Indische Partij, 1919; Indo-Europeesch Verbond, 1919; dan sebagainya.
8. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial atas dasar kebangsaan Indonesia: Perserikatan Nasional Indonesia (kemudian: Partai Nasional Indonesia), 1927; Permoefakatan Perhimpoean-perhimpoean Politik Kebangsaan Indonesia, 1930; Partij Indonesia, 1930; Persatoean Bangsa Indonesia, 1931; dan sebagainya.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 Pemuda-pemuda yang menghadiri Kongres Pemuda Indonesia II menyatakan tekad bersama yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda:

"Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia," tanpa menyatakan apa yang diartikan dengan "Indonesia."

Pada sidang Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka yang diadakan di Jakarta tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ternyata bahwa pada waktu itu para pemimpin gerakan kebangsaan Indonesia belum sepakat tentang batas-batas wilayah dan penduduk yang dicakup oleh nama "Indonesia." Tanggal 11 Juli diadakan pemungutan suara dan keputusan bersama. Ternyata ada 5 kemungkinan pilihan:

1. "Hindia Belanda dahulu."
2. "Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor semuanya."
3. "Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor dan kepulauan sekelilingnya," (usul M. Yamin, Soekarno).
4. "Hindia Belanda dahulu minus Papua" (usul M. Hatta).
5. "Hindia Belanda dahulu, ditambah Malaka, dipotong Papua."

(Keterangan: dengan Malaka dimaksud Semenanjung Malaka; dengan Papua dimaksud Irian).

Sesudah diadakan pemungutan suara, suara memperlihatkan 39 dari 66 suara memilih no. 3; dan 19 memilih no. 1; sehingga ketua Radjiman menyatakan:

"Dan saya tetapkan pada saat ini para anggota yang terhormat yang diputuskan, yang disahkan hari ini oleh persidangan, yaitu bahwa daerah yang masuk Indonesia merdeka: Hindia-Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya."

Sebelum pemungutan suara dilakukan, Soekarno antara lain mengatakan:

"Bahkan pernah ada suatu waktu didalam hidup saya bahwa saya mengenang-ngekan suatu Pan Indonesia, satu Pan Indonesia yang meliputi pula didalamnya bukan saja Malaya dan Papua, tetapiupun kepulauan Pilipina Tetapi Pilipina telah Merdeka. Kedaulatan bangsa Pilipina harus kita hormati. ..."

Fakta sejarah yang memperlihatkan bagaimana "Indonesia" diartikan oleh pemimpin-pemimpin gerakan kebangsaan kita tidak lebih dari satu bulan ditambah satu minggu sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ditampilkan sebagai pencerminan pemikiran, bahkan keinginan, untuk memperluas wilayah Republik Indonesia, melainkan untuk memperlihatkan bahwa batas-batas pengertian "Indonesia" adalah sangat baru. Siapa yang dianggap termasuk orang Indonesia

dan siapa yang tidak didasarkan atas "kesepakatan, kehendak yang jelas untuk meneruskan hidup bersama."

KENYATAAN YANG KITA HADAPI

Penduduk yang berjumlah lebih dari 160.000.000 manusia, hidup di kepulauan yang terbentang luas, lebih luas daripada benua Eropa atau Amerika Utara.

1. Penduduk Kepulauan Indonesia mewujudkan ras-ras manusia yang berbeda-beda (Mongoloid, Negroid, Caucasoid), masing-masing dengan ciri-ciri fisik tertentu, sebagai akibat pewarisan biologi. Banyak orang beranggapan bahwa orang-orang yang merupakan suatu ras juga mempunyai ciri-ciri kepribadian tertentu, watak tertentu, malah kebudayaan tertentu, tetapi kenyataan tidak membenarkan anggapan demikian. Ada kecenderungan pada banyak orang untuk mempertahankan kemurnian ras masing-masing, tetapi banyak orang yang menganggap diri perwujudan ras murni asli, adalah tidak murni adalah campuran. Lagi pula, sekalian ras manusia yang merupakan penduduk Indonesia masing-masing hanya merupakan sebagian dari keseluruhan ras yang bersangkutan; bagian lain dari masing-masing ras tanpa kecuali, berada di luar wilayah Indonesia.
2. Penduduk Kepulauan Indonesia mewujudkan beraneka suku-bangsa, yang dahulu masing-masing dikenal sebagai bangsa tersendiri (bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Minangkabau, bangsa Melayu, bangsa Bugis, bangsa Bali, bangsa Minahasa dan sebagainya). Masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri (termasuk kepercayaan-kepercayaan) sendiri, bahasa sendiri, struktur masyarakat sendiri, sistem politik sendiri, dan, ini yang amat penting, wilayah (tanah air!) sendiri. Anggota-anggota masing-masing suku bangsa cenderung mempunyai identitas sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan dan oleh sebab itu dalam keadaan tertentu mewujudkan rasa setia kawan, solidaritas, dengan sesama anggota suku bangsa yang bersangkutan di kota-kota besar, seperti Jakarta, terdapat sejumlah orang yang tidak mempunyai identitas suku bangsa tetapi jumlah orang-orang demikian sangat sedikit dibanding dengan orang-orang yang mempunyai identitas suku bangsa. Di masing-masing daerah ada suku bangsa tertentu yang merupakan mayoritas; orang-orang lain merupakan minoritas. Suku bangsa yang merupakan mayoritas di satu daerah bisa merupakan minoritas di daerah lain. Di beberapa daerah tidak ada mayoritas yang jelas. Minoritas tidak selalu merupakan golongan yang terugikan oleh mayoritas. Orang-orang yang bukan kelahiran daerah yang bersangkutan, malah sering kali orang-orang yang bukan anggota suku bangsa yang menganggap daerah yang bersangkutan sebagai kampung ha-

lahan, tanah air, tanah yang diwarisi dari para nenek moyang, cenderung dianggap sebagai "orang luar," "bukan orang kita" oleh orang-orang pribumi daerah yang bersangkutan.

3. Penduduk Kepulauan Indonesia mewujudkan berbagai agama, sehingga terbentuk berbagai umat agama besar: Islam, Kristen Protestan, Katolik Roma, Hindu-Bali. Penganut masing-masing agama besar, terutama agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik Roma berkeyakinan bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang benar dan berbagai penganut, oleh sebab itu, merasa berkewajiban berusaha agar orang-orang yang tidak menganut agama yang bersangkutan dijadikan penganutnya. Masing-masing umat merupakan suatu masyarakat moral yang juga merupakan suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang sedikit banyaknya solidier satu dengan yang lain. Di satu pihak, masing-masing agama besar memperkuat persatuan nasional Indonesia karena mempersatukan para penganut agama yang sama dari berbagai ras, berbagai suku bangsa, berbagai golongan sosial lain menjadi satu umat, tetapi di lain pihak masing-masing agama besar bisa menghambat persatuan nasional Indonesia karena para penganutnya bisa memisahkan orang lain yang tidak seagama, malah menolak mengganggu orang-orang yang tidak seagama ini.

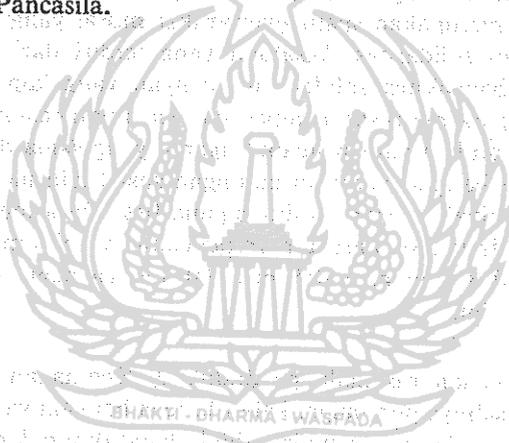
Adanya perbedaan ras pada penduduk di Kepulauan Indonesia, yang batas-batas pemisahannya pun sangat kabur karena banyaknya percampuran antar ras di masa lalu dan sekarang ini, tidak dapat dipungkiri, harus diterima sebagai kenyataan yang tidak mungkin dan tak perlu diubah. Begitupun halnya dengan perbedaan suku bangsa. Paling sedikit sekalian suku bangsa yang besar, yang banyak anggotanya akan bertahan terus sebagai kolektiva-kolektiva sosial yang mempunyai kebudayaan sendiri dan wilayah kediaman sendiri. Orang-orang Fries di Nederland, orang-orang Basque di Spanyol, orang Georgia di Uni Soviet, orang Scotlandia di Inggris dan banyak lagi kolektiva-kolektiva sosial yang sejenis tetap bertahan meskipun mengalami industrialisasi, modernisasi. Perbedaan agama pun haruslah diterima sebagai kenyataan yang tidak bisa diubah. Selain beberapa orang perorangan, pada umumnya masing-masing orang, betapapun lemahnya keyakinannya agamanya tidak akan menjadi penganut agama lain, sehingga masing-masing agama akan bertahan dengan jumlah penganut yang cukup besar untuk memungkinkan kehidupan agama yang terus-menerus berkembang subur.

Karena perbedaan-perbedaan ras, suku bangsa dan agama tidak dapat diubah, haruslah diusahakan pengaturan hubungan antar ras, antar suku bangsa, dan antar agama yang tidak merugikan satu sama lain, malah, kalau dapat saling mendukung satu sama lain.

CITA-CITA KITA

Cita-cita kita bersama adalah sederhana tetapi agung: suatu masyarakat di mana sekalian golongan (kecuali golongan penjahat) dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain dan bahkan membantu, mendukung golongan-golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Cita-cita demikian hanya dapat tercapai bilamana kita semua berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita maupun berpedoman pada Pancasila.



Peranan Dunia Usaha dan Kewiraswastaan dalam Pembentukan Bangsa

Daoed JOESOEFF

Wiraswasta dan pengusaha di dalam pekerjaannya sehari-hari tidak mungkin diabstrakkan dari bangsa di mana mereka tergolong. Karena, secara fundamental hubungan ekonomi selalu merupakan campuran antara pertukaran barang dan perbandingan kekuatan. Perbedaan dan ketidaksepadanan dalam kekuatan para pelaku ekonomi yang mengadakan hubungan tetap merupakan faktor yang ikut menentukan dan ini lebih-lebih berlaku sejauh hubungan tersebut terletak di bidang perdagangan (pertukaran) internasional. Baik harga maupun kuantum yang disepakati di bidang ini selalu ditandai oleh faktor kekuatan tersebut, demikian pula arus dan keseimbangan barang dan jasa yang terbentuk di situ. Dari cara melihat seperti ini kiranya dapat disimpulkan beberapa tanggapan-ekonomi mengenai "bangsa."

Suatu bangsa dalam dirinya merupakan satu kombinasi kegiatan dan usaha ekonomi (industri) para warganya. Isi, dimensi dan pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam berbagai sektor (pertanian, pertambangan, perindustrian, administrasi, dan lain-lain) menentukan struktur neraca pembayarannya terhadap luar negeri, kesanggupannya mempengaruhi bangsa lain dan kemampuannya menerima ataupun menolak pengaruh dari luar.

Suatu bangsa, dipandang dari sudut lokalisasi usaha dan kegiatan ekonomi para warganya, merupakan gabungan daerah maju dan terbelakang, kombinasi jaringan transpor dan zona penggerak pembangunan. Sifat, letak dan bobot elemen-elemen itu di dalam keseluruhannya menentukan apakah kegiatan bangsa ini akan sampai melampaui batas kebangsaannya atau menerima kegiatan lanjutan dari bangsa lain.

Suatu bangsa adalah kombinasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dan finansial. Kombinasi ini merupakan dasar kemampuannya untuk mengenga-

ruhi partnernya di bidang internasional dan atau menghadapi pengaruh yang hendak didesakkan oleh pihak lain kepadanya. Kemampuan ini diterapkan baik melalui pasaran modal, uang ataupun mythe uang nasionalnya.

Di bidang pertukaran barang dan jasa antar-bangsa, perkembangan teknologi telah mengubah "ekonomi internasional" menjadi *ekonomi-dunia* melalui perubahan yang ditimbulkannya dari ekonomi "faktor produksi" menjadi ekonomi "pengetahuan." Bangsa yang tidak turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi-dunia tersebut berarti menulis resep bagi dekadensi ekonomi nasionalnya sendiri. Turut berkecimpung dalam ekonomi-dunia berarti tidak mengasingkan dan menutup diri secara autarkis tetapi berarti secara sadar mengaitkan perkembangan ekonominya pada perkembangan ekonomi bangsa lain. Ternyata sangkut-paut ekonomi bangsa-bangsa itu sudah begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kini praktis tidak ada satu bangsa pun yang benar-benar berdiri sendiri, sesedikitnya tidak di semua bidang ekonomi.

Bagi pelaku ekonomi individual, besar kecilnya hasil yang dapat ditariknya dari keturutsertaannya di bidang lalu-lintas pertukaran internasional, tergantung sekali dari keseluruhan struktur di mana dia tergolong; dengan perkataan lain, tergantung pada "bangsa" mana dia termasuk. Sebaliknya, struktur yang berbeda-beda dari bangsa tidak hanya menentukan perbedaan hasil pelaku ekonomi individual, tetapi juga menentukan akibat dan pengaruh yang diterima bangsa itu sendiri dari keturutsertaannya dalam ekonomi dunia. Dengan perkataan lain, ekonomi dunia memberikan pengaruh yang asimetrik terhadap bangsa-bangsa sesuai dengan "struktur" yang membentuk tubuh bangsa itu sendiri. Maka itu bagi sesuatu bangsa yang ingin turut serta dalam ekonomi dunia, dan memang hampir tidak mungkin untuk tidak turut, sebaiknya lebih dahulu meneliti dengan sempurna struktur yang membentuk dirinya. Apakah struktur yang dipunyainya merupakan modalitas yang kuat (ampuh) atau lemah untuk terjun di dalam ekonomi dunia.

Ekonomi dunia seperti yang kita alami sekarang dilahirkan dan dibesarkan oleh suatu wawasan politik yang tumbuh dan berkembang dengan pesatnya di Eropa Barat sesudah Perang Dunia Kedua, yang mulai tahun 1974 dalam berbagai kesempatan saya sebut dengan satu istilah yang saya kira sekarang ini masih tetap berlaku, yaitu "nasionalisme baru."¹ Nasionalisme baru (di Eropa Barat) inilah yang secara esensial memelopori pembentukan ekonomi dunia yang semakin lama menjadi semakin kukuh dengan pertumbuhan kedewasaannya.

¹ Lihat antara lain, Daed Joesoef, "Knowledge Economy and World Economy," *Indonesian Quarterly*, Vol. II, No. 2 (January 1974), dan "The New International Economic Order," *Indonesian Quarterly*, Vol. V, No. 1 (January 1977).

Bila ada "nasionalisme baru" tentu ada bandingannya yang layak disebut sebagai "nasionalisme lama." Memang ada nasionalisme lama ini, tetapi dalam kenyataannya berusia tidak "setua" berbagai bentuk utama dari politik Eropa di bidang kebangsaan dan ketatanegaraan. Abad ke-19 merupakan suatu peralihan dari Eropa-Kerajaan yang dibentuk oleh dinasti sesuatu keluarga ke Eropa-Kebangsaan yang dibentuk oleh rakyat yang berdaulat. Namun dalam berbuat begini rakyat tersebut mengambil-alih pula sebagian dari hasrat-hasrat kemutlakan dari monarki di tahap akhir purna-feodalnya itu.

Di masyarakat Eropa abad ke-19 itu terdapat dua golongan utama, yaitu kaum tani yang sudah dibebaskan dari kekuasaan tuan-tuan tanah dan kaum menengah yang untuk sebagian besar terdiri dari wiraswasta dan pengusaha kecil serta sebagian kecil cendekiawan dan pekerja otak (knowledge workers). Mereka ini turut memupuk perkembangan nasionalisme lama dengan wawasan kaumnya masing-masing.

Sumbangan kaum tani pada perkembangan politik nasional Eropa ketika itu berupa wawasan kewilayahan. Sumbangan seperti ini ternyata kemudian berakibat fatal karena ia merumuskan keamanan, progres dan kepentingan nasional dalam artian luasnya tanah -- di satu benua di mana setiap jengkal tanah sudah ada yang memilikinya. Mengingat teknologi pertanian belum maju ketika itu, satu-satunya harapan petani untuk memperoleh keberuntungan ekonomi adalah dengan jalan mendapat tanah garapan yang lebih luas. Rasa "kekurangan tanah" ini dihayati pula oleh pemerintahnya masing-masing dan dijadikan pegangan dalam kebijakan luar negerinya. Berhubung dengan itu letak garis perbatasan nasional menjadi masalah yang diperdebatkan antar-bangsa. Sampai Perang Dunia Kedua, tuntutan Hitler untuk memperoleh "Lebensraum" bagi Jerman di sebelah timur negerinya segera didukung oleh rakyat Jerman yang merasa bahwa energi nasionalnya sangat terkekang oleh batas-batas negerinya yang ada.

Kaum menengah Eropa mempunyai juga kecenderungan politik yang sama. Dalam berpolitik mereka meminta dari pemerintahnya masing-masing campur tangan sesedikit mungkin di samping bantuan sebanyak mungkin untuk mendapatkan pasaran dan mempertahankannya bila berhasil direbut. Pengaruh mereka ini akhirnya menimbulkan pertarungan ekonomi di Eropa dan penjajahan di luar Eropa. Kaum menengah Eropa kiranya menganut pula pendirian kaum tani yang serba mutlak atas apa yang dimiliki. Sebab, biar bagaimanapun kaum tani ini adalah "leluhur" mereka. Namun ketika dilanjutkan ke kebijakan luar negeri, pendirian seperti itu menjadi pendirian "nasionalisme lama" tentang kedaulatan yang tidak terbatas.

Sama halnya dengan Eropanya dinasti, dewasa ini Eropanya petani dapat dikatakan sudah lenyap. Setiap tahun jumlah petani terus menurun. Betapapun rendahnya pendidikan formal yang ditempuh petani untuk menjalankan

fungsi profesionalnya, ia sadar bahwa sekarang ini lebih banyak pupuk, lebih banyak mesin, pasaran yang lebih luas -- dan barangkali dukungan harga dari pihak pemerintahnya -- merupakan jalan yang lebih baik ke arah progres ke-timbang luasnya tanah.

Di pihak lain, kaum menengah mendorong kelahiran dan penggunaan teknologi modern di Eropa. Memang baru kira-kira 40 tahun yang terakhir ini dapat dilihat betapa implikasi teknologi telah mengubah struktur sosial dan sikap politik benua tua Eropa. Ia kini sadar bahwa tanah dan sumber-sumber fisik bukan lagi merupakan faktor-faktor penghambat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bangsa. Untuk menaikkan derajat hidupnya ia tidak perlu lagi berkembang secara horisontal dengan berpijak pada tanah bangsa lain karena tujuan yang sama kini dapat dicapainya dengan bergerak secara vertikal ke dalam ruang progres teknologi yang tidak terbatas.

Dengan begini lahirlah apa yang saya sebut sebagai "nasionalisme baru" di Eropa, suatu wawasan politik yang dihidupi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ketatanegaraan ia telah memupuk pengertian "negara-bangsa," yang sebelum Perang Dunia Kedua praktis tidak dikenal. Di bidang ekonomi, ia telah membentuk "ekonomi pengetahuan" di dalam negeri dan "ekonomi dunia" di luar negeri, yaitu dua bentuk ekonomi yang sebelum Perang Dunia Kedua juga tidak dikenal.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas kiranya dapat dikatakan bahwa ada tempat yang terhormat bagi pengusaha dan wiraswasta di masyarakat kita. Tempat mereka ini di masyarakat bisnis yang dalam dirinya merupakan bagian (sub-community) dari masyarakat nasional kita. Melalui kegiatan profesional mereka ini masyarakat bisnis menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan karenanya memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembentukan pendapatan nasional. Kelimpahan material yang dihasilkan ini pada gilirannya mensubsidi hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan intelektual-spiritual yang pada pokoknya dihasilkan oleh masyarakat-bagian lainnya (masyarakat religius, masyarakat artistik, masyarakat ilmiah, dan lain-lain).

Mengingat tempat kedudukan mereka ini, pengusaha dan wiraswasta sebenarnya tidak hanya dapat, bahkan seharusnya ikut berperan-serta secara aktif dalam usaha pembentukan bangsa (nation building). Mereka secara sadar dan sistematis harus membuat bangsa kita berstruktur ekonomi yang sepadan untuk mampu turut-serta secara menguntungkan dalam kegiatan ekonomi dunia, sesedikitnya untuk sanggup menghadapi akibat atau pengaruh yang asimetrik dari perputaran ekonomi dunia itu. Untuk tujuan nasional ini mereka seharusnya membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi paralel dengan ekonomi-ekonomi nasional lainnya yang "merajai" ekonomi dunia tersebut melalui pembinaan dunia usaha yang mereka pimpin dan miliki

masing-masing. Dengan perkataan lain, mereka harus berusaha membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi "ekonomi pengetahuan" (knowledge economy) melalui pembinaan dunia usaha yang mereka pimpin dan miliki masing-masing.

Demi pembentukan bangsa melalui pembentukan ekonomi pengetahuan ini, yang dapat dilakukan oleh para pengusaha dan wiraswasta kita berupa empat hal pokok.

Pertama, menerapkan sebanyak mungkin teknologi baru dalam proses produksi yang menjadi urusan bisnis-industrialnya dan tidak hanya puas dengan metode serta prosedur tradisional yang sudah diketahui. Dengan menerapkan teknikalitas hasil ilmu pengetahuan yang terus berkembang ini, para pengusaha dan wiraswasta tidak mengabaikan unsur penting yang telah membina nasionalisme baru di kalangan golongan menengah Barat dan yang kiranya telah menjwai pembentukan ekonomi dunia.

Kedua, pengusaha dan wiraswasta Indonesia harus mempekerjakan sebanyak mungkin pekerja otak (knowledge workers) di perusahaannya masing-masing. Berkat training formal yang telah dialaminya, biasanya pekerja otak inilah yang sangat berminat pada hasil-hasil ilmu pengetahuan terapan dan karenanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tersebut terus-menerus. Kepada mereka ini harus diberikan kesempatan oleh majikannya untuk turut serta dalam forum-forum diskusi internasional yang membahas masalah-masalah teknologi.

Ketiga, dunia usaha sebaiknya mulai membangun pusat-pusat penelitiannya sendiri bagi keperluan perkembangan bisnis jangka panjang di masa depan. Di samping ini mereka selayaknya turut memberikan sumbangan finansial atau peralatan secara teratur kepada lembaga-lembaga riset di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan begini terciptalah kaitan fungsional yang erat antara masyarakat bisnis dan masyarakat ilmiah. Kaitan seperti ini terbukti sangat bermanfaat bagi pembentukan bangsa di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang, karena secara fungsional masyarakat ilmiahlah yang menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, sedangkan masyarakat bisnislah yang secara profesional menerapkan teknikalitas yang dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran ilmiah tersebut. Berkat kerjasama seperti ini terciptalah basis domestik dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu diperlukan oleh bangsa kita untuk dapat turut bermain dengan menguntungkan dalam ekonomi dunia. Mengingat bobot serta kemampuan hasil-hasil ilmu pengetahuan di segala bidang kehidupan dan penguasaan yang mendekati mutlak oleh negara-negara maju atas ilmu pengetahuan, kiranya dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan inilah yang merupakan garis pertama pertahanan dari negara-bangsa yang relatif baru merdeka di abad ke-21 mendatang. Bila negara-bangsa yang terakhir disebut ini lalai, maka garis pertama pertahanan

ini akan menjadi sekaligus garis terakhir dari pertahanan keberadaannya di peta dunia.

Keempat, secara sendiri-sendiri atau secara patungan bersama-sama mendirikan Pusat Latihan Teknik (PLT) yang tidak hanya terbuka bagi karyawan perusahaan tetapi juga terbuka bagi umum, khususnya remaja dan pemuda yang memang berhasrat meningkatkan keterampilannya. Usaha seperti ini pasti mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomi.

Manfaat sosial berupa pelaksanaan asas keadilan, karena melalui training seperti ini asas keadilan yang dituju oleh pembangunan kita dapat lebih terjamin. Betapa tidak. Keadilan di sini tercapai bukan melalui pembagian pendapatan yang lebih merata, tetapi melalui penggunaan lebih banyak oleh pembangunan sumber energi yang praktis dipunyai oleh setiap warga negara, yaitu tenaga kerja manusia. Artinya, dengan meningkatkan mutu teknis tenaga kerja dari "unskilled" menjadi sesedikitnya "rather skilled," kita tidak hanya membantu menaikkan kapasitas mencari nafkah individual, tetapi melipatgandakan modal manusia negeri kita.

Bila direnungkan lebih mendalam, sebenarnya training besar-besaran di bidang teknologi juga mempunyai arti ekonomi yang besar. Adalah satu kenyataan bahwa salah satu kekurangan yang fundamental bagi usaha pembangunan Indonesia adalah kurangnya tenaga teknis menengah yang harus melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan di atas. Teknisi menengah ini, di negeri mana pun, pada dasarnya tidak dihasilkan dalam lingkungan pendidikan formal.

Sekolah-sekolah paling jauh hanya dapat melatih ke arah penguasaan peralatan analisa, baik yang bersifat matematik maupun filosofis. Teknisi menengah ditempa dan dihasilkan di pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis. Di negeri-negeri yang sudah maju pusat-pusat kegiatan tersebut tidak kurang jumlahnya, baik yang berupa pabrik, galangan kapal, maskapai bangunan, asuransi, perbankan, biro administrasi, dan lain-lain. Di negeri yang belum maju seperti Indonesia, justru tempat-tempat pengemblengan tenaga teknis menengah yang seperti itu sangat kurang jumlahnya, sedangkan perkembangan pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis tersebut pada gilirannya sangat tergantung pada ada tidaknya tersedia tenaga teknis menengah tadi. Alhasil terjadilah satu lingkaran yang tak berujung-pangkal.

Maka untuk dapat ke luar dari lingkaran yang mencekik ekonomi ini perlu ditingkatkan kegiatan training keterampilan teknik dan industrial arts dan guna membiayai kegiatan yang terang menelan banyak biaya itulah diperlukan suatu usaha patungan berupa Pusat Latihan Teknik. Dengan begini kita berarti memasukkan teknologi itu sendiri ke dalam masyarakat dan bukannya hanya puas dengan mengimpor hasil-hasil teknologi yang berkembang dan dikembangkan di negeri lain.